



PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA





Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idea* yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar; serta *logos* yang berarti ilmu. Secara etimologis ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa.

Pengertian menurut para Tokoh

- Sastrapratedja : “Ideologi adalah seperangkat gagasan / pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.
- Soerjanto : “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya.”
- Mubyarto : “Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu.
- Martin Seliger : Ideologi sebagai sistem kepercayaan.
- Alvin Gouldner : Ideologi sebagai proyek nasional.
- Paul Hirst : Ideologi sebagai relasi sosial.



Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai cita- cita
negara

Sebagai nilai
integratif bangsa
dan negara





Pancasila memiliki urgensi yang sangat penting sebagai ideologi negara Indonesia.

1. **Identitas Bangsa** : Pancasila merupakan landasan dari identitas bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia. Pancasila telah menjadi ideologi negara yang mengikat seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
2. **Perekat Bangsa**: Pancasila berperan sebagai perekat yang mengikat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan berbagai perbedaan dalam semangat persatuan dan kesatuan.
3. **Pedoman Hidup**: Pancasila bukan hanya sekadar seperangkat prinsip. tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan lain-lain dijadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



4. **Dasar Hukum:** Pancasila menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dibangun di atas landasan Pancasila. Oleh karena itu, memahami Pancasila adalah kunci untuk memahami dasar hukum negara Indonesia.
5. **Pembangunan Berkelanjutan:** Prinsip-prinsip Pancasila juga menjadi landasan dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.



6. Pancasila dalam Tatanan Global : Pancasila tidak hanya memiliki makna dan urgensi di dalam negeri, tetapi juga di tataran global. Sebagai ideologi negara yang unik dan menghargai perbedaan, Pancasila memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun perdamaian, toleransi, dan kerjasama antarbangsa.

Dalam menjelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, penting untuk menekankan bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, serta bagaimana Pancasila menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan dan kesinambungan negara Indonesia.

Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

- Pada masa pemerintahan Soekarno : digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Periode 1945-1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950-1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Priode 1956-1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi Presiden.



Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

- Pada masa pemerintahan Soeharto : Pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya, Pancasila dijadikan sebagai asas Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

- Pada masa pemerintahan Habibie : Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan dikarenakan disibukan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam dan diluar negeri. (Nurwardani, dkk : 2017). Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) sebagai lembaga yang bertanggungjawab memberikan penataran P4, melalui Keppres No 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979.



Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

- Pada masa pemerintahan Abdurrachman Wahid : Presiden Abdurachman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Kong Hu Cu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatnya. Pada masa pemerintahan beliau, diwarnai konflik Gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua.



Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

- Pada masa pemerintahan Megawati : Menitikberatkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun Pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pesekolahan.



Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

- Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono : belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Keppres No 27 Tahun 1999. Namun SBY menandatangani Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. (Nurwardani, 2016).





PANCASILA DI ERA JOKO WIDODO

- Pada 2016, Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila lewat Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016.
- Membentuk Badan Ideologi Pembina Pancasila (BPIP) pada 28 Februari 2018. Badan itu sah terbentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai landasan. Stempel Politik.
- Pakar Hukum Refly Harun dan Asrinaldi (Universitas Andalas) berpendapat ada pemisahan antarkelompok masyarakat di masa pemerintahan Jokowi. Kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah akan dirundung oleh buzzer atau pendengung di media sosial. menggunakan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai stempel politik. Kelompok yang tak sejalan akan dicap tidak Pancasila.

Tinjauan Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa : mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib diluar keberadaan manusia.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab : kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain.
- c. Sila Persatuan Indonesia : rasa cinta tanah air dan solidaritas.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan : mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama serta menghargai perbedaan pendapat.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia : tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya.





Tinjauan Politis Pancasila sebagai Ideologi

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi umat beragama
- Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia
- Sila Persatuan Indonesia : mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan.
- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan : mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia : tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok.
(Belmawadikti).





THANK YOU

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

otih handayani is talking...



Participants (14)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- 202310715225 ANSORI MAHM... (muted)
- AS Alifia Salsabila (muted)
- A Azka Dzafir (muted)
- DP Dea puspita (muted)
- DG Dicky Gunawan (muted)
- F Fadel Muhammad Akmal (muted)
- FA Fadhito Akbar (muted)
- F FRENLI APRIYANTO SITORUS_IL... (muted)
- HC Hendricus Cahyo (muted)
- LS Leonardo sitorus pane -Inform... (muted)
- NR Nandio Rizki W (muted)
- RA Renaldi Akbar (muted)

Invite Mute all